

Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Kantor Camat Tanah Jawa

Vica Mutiara^{1*}, Dedi Amrizal²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : vicamutiarashandy@yahoo.com

Abstract : The implementation of tasks in the context of local government still faces various problems in their implementation and authority in order to realize good governance as a whole. The problem that occurs is that the community is positioned as a party that serves not served, lack of transparency in decision making by the government, the freedom of the public in issuing opinions, criticism or suggestions, and the problem of service discrimination that looks at ethnicity, religion, position and family relations. How is the effect of applying the principles of good governance in public services in the Tanah Jawa District District Office, Simalungun Regency. how the effectiveness of the application of the principles of good governance in public services in the District Office of Tanah Jawa Sub-District, Simalungun Regency. This can be seen from the active community in the implementation of public services, but the latest information is rarely obtained by rural communities, and the District Government has met the needs of the community, but has not run efficiently because there is still a lot of time wasted, and the accountability given by the District Government has been running sufficiently well.

Submit:

Keyword : Good Governance, Public Service in Government

Review:

Publish:

Abstrak : Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani, kurang transparannya pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, ketidakbebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, kritikan ataupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang melihat suku, agama, jabatan, dan hubungan kekeluargaan. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, namun informasi terbaru jarang didapat oleh masyarakat pedesaan, dan Pemerintahan Kecamatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, namun belum berjalan efisien karena masih banyak membuang- buang waktu, serta pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintahan Kecamatan sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik di Pemerintahan

Citation :

PENDAHULUAN

Penerapan good governance merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya good governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sedermayanti, 2003).

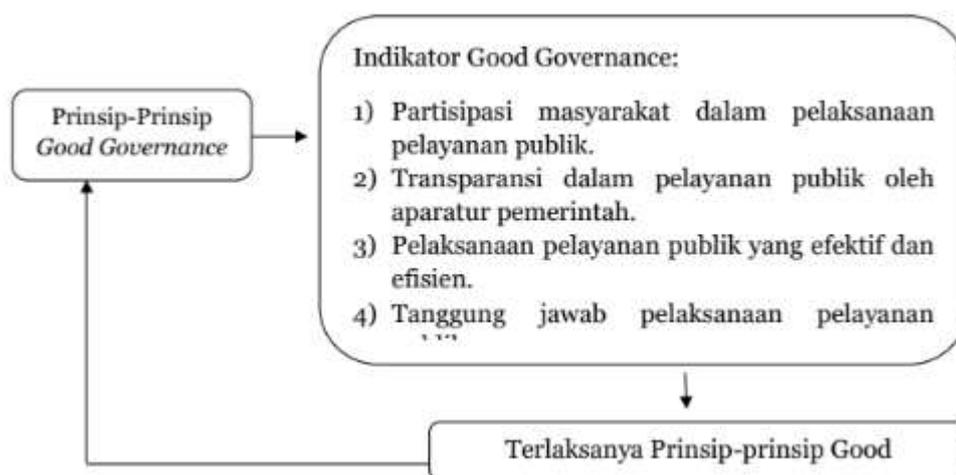
Dalam perspektif otonomi daerah, khususnya di Indonesia, penerapan good governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Adisasmita, 2006). Hal ini didukung dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya (Ali, 1997, Djohan, 2007, Nugroho, D, 2004).

Tujuan good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, dan pihak swasta). Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Dwiyanto, 2005). Ada beberapa alasan pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good governance di Indonesia (Emerson, 1994). Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan public melibatkan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi (Supriadi, 2001, Gie, 2000, Moenir, 2002).

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memperbaiki pelayanan publik dengan mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance. Penerapan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling keterkaitan. Sehingga pelayanan publik mendapat tanggapan positif dari masyarakat (Hardiyansyah, 20 C.E., Kotler, 2002).

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara-cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri.



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Analisis kualitatif yaitu mengolah data dengan cara menyaring informasi kejadian yang ada kemudian menghubungkannya serta menabulasikannya melalui teknik analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kemampuan nalar pendidikan dalam menghubungkan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari peneliti itu sendiri.

Teknik Pengumpulan

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana teknik ini menganalisa data penelitian untuk memecahkan masalah yang ada, yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dengan tahapan yang dapat merancang secara konseptual, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif rancangan dan menyiapkan spesifikasi rancangan yang sesuai dengan permintaan, sedangkan merancang secara fisik, meliputi rancangan formulir, laporan dan prosedur serta pengendalian.

Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Kantor Camat ini berada di Jalan Sisingamangaraja No. 163 Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dengan waktu penelitian dimulai dari tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Aspek Yang Mempengaruhi Kehidupan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan jabatan/pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara otomatis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan-ulasan berikut ini. Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki—laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada table 1.

Tabel 1. Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu Sarjana (S1) dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%, dan tingkat SMA dengan frekuensi 1 orang atau 20%. Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu usia 25 tahun sampai 40 tahun, dan usia 41 tahun sampai 55 tahun. Pada tabel 2 akan terlihat persentase kategori menurut umur narasumber.

Tabel 2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase(%)
1	25-40 tahun	2	40%
2	41-55 tahun	3	60%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berusia 35-40 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40%, dan narasumber yang berusia 41-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%.

Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan pihak Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa berfungsi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan rasa kepuasan dalam terlaksananya pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintahan Kecamatan sudah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda-beda, Pemerintahan Kecamatan siap melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Hal ini berarti Pemerintahan Kecamatan sudah berjalan efektif. Tetapi, pelayanan Pemerintahan Kecamatan belum berjalan efisien, karena menurut narasumber yang berasal dari masyarakat, hasil dari pelaksanaan pelayanan publik masih memiliki kendala di waktu. Setiap pelaksanaan pelayanan publik, masyarakat harus menunggu lama, tidak ada respon yang cepat, dan ketidak adanya kepastian dari pihak Pemerintahan Kecamatan.

Pelayanan publik kepada masyarakat, pihak Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa telah transparan dalam segala hal baik itu mengenai informasi maupun yang lainnya. Untuk informasinya sendiri sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan adanya sosialisasi yang diberikan petugas Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa atau bisa datang langsung ke Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa. Karena transparansi pelayanan merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik .

Jika terjadi masalah mengenai pelayanan baik itu tidak mendapatkan informasi ataupun yang lainnya, masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan kepada pihak Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa dengan datang langsung ke Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta analisis data, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun adalah:Partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa sangatlah tinggi, itu semua disebabkan tingginya harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik terbukti cukup berhasil. Hal tersebut disebabkan karena aktifnya masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan ide dan saran serta dukungan kepada Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa sudah transparan dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih kurang maksimal, karena masih ada masyarakat pedesaan yang sering tidak mendapat informasi terbaru mengenai pelayanan.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta..
- Ali, F. (1997). *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Djohan, D. (2007). *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Emerson, H. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Gie, T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty, Jakarta.
- Hardiyansyah. (20 C.E.). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran di Indonesia, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara,. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, D, R. (2004). *Evaluasi Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi*. Gramedia, Jakarta., 2004.
- Sedermayanti. (2003). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Supriadi, F. J. dan D. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita, Yogyakarta.